

# LAPORAN KINERJA (LKj) TA. 2019



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun 2019 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal, 27 Maret 2020

KEPALA BAPENDA



YONHERI, SP, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19690801 199703 1 007



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi.....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	8
<b>Bab II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
<b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Bapenda .....	19
B. Realisasi Anggaran .....	54
<b>Bab IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019	
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja	
Lampiran 5 Evaluasi Internal Kinerja Sasaran Tahun 2019	
Lampiran 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di tetapkan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2019, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2016-2021) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah
- b. Optimalisasi Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- c. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Teknologi Informasi, Sistem Perencanaan, Pendataan, Penilaian, Penetapan Penatausahaan, Pembinaan, Pengembangan, Penagihan, Sistem Pengawasan Internal, Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan maupun Kegagalan melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

#### **1. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

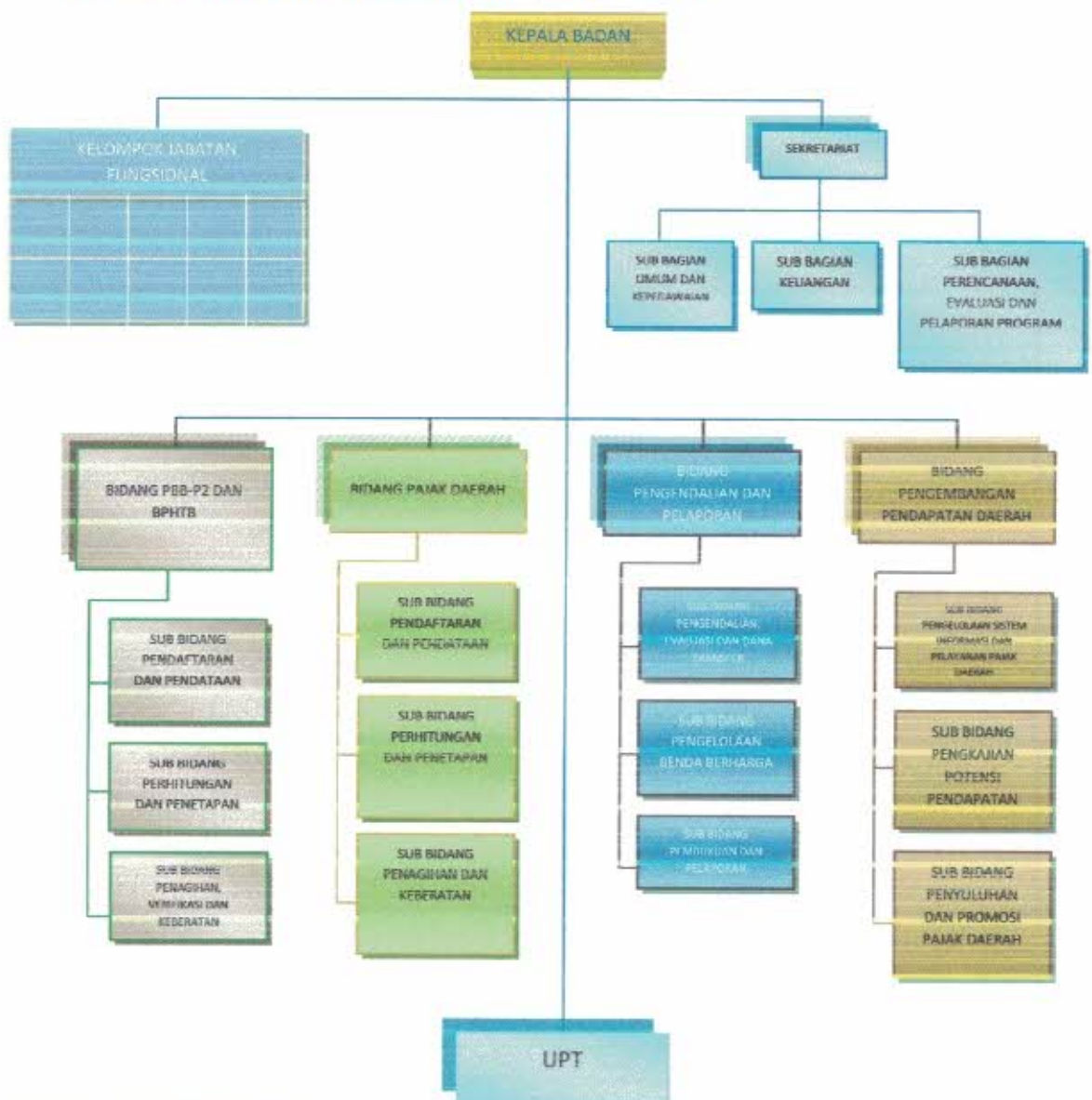
#### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;

- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah





Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
  1. Sub bagian Umum Kepegawaian
  2. Sub bagian Keuangan
  3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
- b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
  1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
  2. Sub bidang Perhitungan dan Penetapan
  3. Sub bidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
  2. Sub bidang Penilaian dan Penetapan
  3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan
- d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas :
  1. Sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer
  2. Sub bidang Pengelolaan Benda Berharga
  3. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
- e. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  1. Sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah
  2. Sub bidang Pengkajian Potensi Pendapatan
  3. Sub bidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah

#### 4. Sumber Daya Aparatur

Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Sejumlah 122 Orang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	5	5	-
	- Eselon IV	16	9	7

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SMA	16	10	6
	- Sarjana Muda	3	-	3
	- Sarjana	28	15	13
	- Pasca Sarjana	3	2	1
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	45	24	21
	- CPNS	5	3	2
	- Kontrak	72	36	36
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	-	-	-
	- Diklat PIM III	3	3	-
	- Diklat PIM IV	9	5	4

## 5. Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahun 2019 di dukung oleh APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam DPA BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	Rp. 6.088.707.880
2. Belanja Barang Jasa	Rp. 9.302.099.989
3. Belanja Modal	Rp. 805.700.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16.116.507.869</b>

## 1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

**Bab I**     Pendahuluan

**Bab II**    Perencanaan Kinerja

**Bab III**   Akuntabilitas Kinerja

    A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

    B. Realisasi Anggaran

**Bab IV**    Penutup

### **Lampiran - lampiran:**

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
- Lampiran 4 Pengukuran Kinerja
- Lampiran 5 Evaluasi Internal Kinerja Sasaran Tahun 2019
- Lampiran 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS.**

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 4 misi, yaitu:

- Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
- Misi II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agrobisnis dan perikanan.
- Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, **tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sehingga terjadi perubahan nomenklatur dan perubahan Rencana Strategis dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya berdasarkan (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun (perubahan) Renstra yang mengacu pada (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Renstra Perangkat Daerah direvisi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator serta target kinerja sebagai berikut :

**MATRIK RENSTRA PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPONDOK JABUNG BARAT  
TAHUN 2016-2021**

Visi Pemerintah Kab. Tanjung Barat Tahun 2016-2021	Misi IV	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD					Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD																			
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas	Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Harmonisasi kehidupan beragama dan kebudayaan, Supremasi Hukum dan Tata Kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Asli Daerah	<p><b>Tingkat Penertimaan Asli Daerah (Indikator Utama)</b></p> <p>Persentase Peningkatan Penertimaan 9 Pajak Daerah (Bid. Pajak Daerah)</p> <p>Persentase Peningkatan Penertimaan PBB-P2 dan BPHTB (Bid. PBB P2 dan BPHTB)</p> <p>Persentase Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu dan Benar (Bid. Pengendalian dan Pelaporan)</p> <p>Persentase Potensi Sumber Pendapatan Daerah yang di Implementasikan (Bid. Pengembangan Pendapatan Daerah)</p>	6%	6%	0,21%	0,2%	5,1%	5,3%	5,7%	10%	10%	8,11%	10%	12,12%	12,43%	12,98%	10%	10%	0,18%	0,51%	0,74%	1,31%	1,70%	100%	100%	100%	100%	1%	1%	1%	1%	1%



VIsi Pemerintah Kab. Tanjung Barat Tahun 2016-2021	Misi IV	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
			2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indikator Utama)</b> Nilai AKIP Persentase Pemenuhan Komponen IKM (Sekretaris) Persentase Pemenuhan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Sekretaris) Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP (Sekretaris)	-	-	-	-	76,61	77	78	-
					-	-	-	-	90%	95%	100%	100%
					-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
					-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Dari beberapa Indikator diatas yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Tingkat kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/ Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Eselon II, III dan IV Bapenda sesuai dengan Tupoksinya, sebagai berikut :

### Perjanjian Kinerja Bapenda Kab. Tanjab Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	5,1%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Niali Akip	76,61 62

SEKRETARIS		
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Persentase pemenuhan komponen IKM	90%
	- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
	- Persentase pemenuhan komponen SAKIP	100%
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	12 bln
	- Tersedianya Pelayanan Komunikasi, SD Air & Listrik	12 bln
	- Tersedianya Pelayanan Kebersihan Kantor	12 bln
	- Tersedianya penyediaan Brg Cet. & Penggandaan	12 bln
	- Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bln
	- Tersedianya makan minum rapat, jamuan tamu, Petugas Piket Pelayanan	12 bln
	- Tersedianya Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
	- Terpenuhinya Bahan Bacaan	12 bln
	- Terlaksananya rapat koordinasi dengan pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kab Lainnya	12 bln
	- Terlaksananya Layanan iklan masyarakat	100%
	- Jumlah Pengadaan Sarana prasarana aparatur	96 unit
	- Jumlah Pem. Rutin/berkala Kend. Dinas/operasional	43 unit
	- Jumlah pem.rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bln
	- Gedung kantor yang terpelihara	100%
	- Jumlah laporan barang inventaris kantor	12 bln
- Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	24 org	
- Jumlah pembuatan pakaian dinas seragam untuk PNS, TKK/TKS	275 stel	
KASUBBAG KEUANGAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	- Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen
Tersusunnya laporan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah	- Jumlah laporan penerimaan perangkat daerah	12 laporan
KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersusunnya dokumen perencanaan OPD	- Jumlah dokumen Renja (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir, rancangan perubahan dan rancangan akhir perubahan )	5 dokumen
	- Jumlah Dokumen RKA (RKA, RKA-P)	2 dokumen
Tersusunnya laporan capaian evaluasi kinerja dan laporan kinerja OPD	- Jumlah laporan capaian kinerja OPD	12 laporan
	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan (evaluasi rencana aksi, evaluasi renja, evaluasi rencana serta LPPD dan LKJ)	5 dokumen



<b>KABID PBB-P2 DAN BPHTB</b>		
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya penerimaan PBB - P2 dan BPHTB	Persentase peningkatan penerimaan PBB - P2 dan BPHTB	1,31%
<b>KASUBBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Data Wajib Pajak PBB-P2 yang akurat <i>Tersedianya Data BPHTB</i>	- Jumlah data Wajib Pajak PBB-P2 - Jumlah data objek dan subjek BPHTB yang diverifikasi	7.000 OP 700 OP
<b>KASUBBID PERHITUNGAN DAN PENETAPAN</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terbitnya SPPT Objek PBB P2 dan BPHTB	- Jumlah penerbitan SPPT PBB P2/BPHTB - Jumlah penetapan dan pencetakan SPPT PBB-P2	114.000/700 OP 114.000 SPPT
Meningkatnya kemampuan dan pemahaman aparat kecamatan, kelurahan dan desa terhadap pengelolaan PBB-P2	- Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi intensifikasi PBB P2	1 kali
Tercapainya penerimaan PBB-P2	- Realisasi penerimaan PBB-P2	6 M
<b>KASUBBID PENAGIHAN, VERIFIKASI DAN KEBERATAN</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tercapainya penerimaan PBB-P2	- Jumlah Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB-P2	110.000 SPPT 700 BPHTB
Tersedianya laporan yang akurat	- Rekonsiliasi penerimaan dan piutang PBB-P2	1 kali
Meningkatnya pelayanan kepada WP (masyarakat)	- Jumlah Pelayanan mobil keliling PBB-P2	88 kali

<b>KABID PAJAK DAERAH</b>		
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya penerimaan 9 Pajak Daerah Lainnya	Persentase peningkatan Penerimaan 9 Pajak Daerah	12,43%
<b>KASUBBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Data Wajib Pajak Daerah yang up to date	- Jumlah pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah	14.600 SPTPD/SKPD
Meningkatnya pengendalian pajak daerah melalui pemeriksaan pajak daerah	- Jumlah data objek pajak yang diperiksa	33 WP
<b>KASUBBID PENILAIAN DAN PENETAPAN</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersampainya SPTPD/SKPD yang diterbitkan kepada WPD	- Jumlah SPTPD/SKPD yang diterbitkan dan disampaikan kepada WPD	10.441 SPTPD/SKPD
Tercapainya penerimaan 9 pajak daerah	- Persentase realisasi penerimaan 9 pajak daerah	100%
<b>KASUBBID PENAGIHAN DAN KEBERATAN</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tercapainya penerimaan 9 pajak daerah Tercapainya penerimaan PAD	- Jumlah SPTPD/SKPD yang ditagih - Jumlah koordinasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dengan tim penertiban pajak	100% 16 kali

<b>KABID PENGENDALIAN DAN PELAPORAN</b>		
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelaksanaan, administrasi dan pembukuan pendapatan daerah	Persentase laporan pendapatan daerah tepat waktu dan benar	100%
<b>KASUBBID PENGENDALIAN, EVALUASI DAN DANA TRANSFER</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tercapainya target penerimaan pendapatan daerah	- Jumlah koordinasi penerimaan dana transfer ke pemerintah pusat	12 kali
Tersedianya laporan evaluasi penerimaan dana transfer	- Jumlah laporan evaluasi penerimaan dana transfer pertriwulan	4 laporan
<b>KASUBBID PENGELOLAAN BENDA BERHARGA</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelayanan dan administrasi benda berharga dengan efektif, efisien dan tepat waktu	- Jumlah jenis pelayanan benda berharga	40 jenis
<b>KASUBBID PEMBUKUAN DAN PELAPORAN</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tertibnya administrasi pelaporan pendapatan daerah	- Jumlah laporan penerimaan dan pendapatan daerah	12 laporan
Tersedianya laporan rencana penerimaan pendapatan daerah	- Jumlah laporan rencana penerimaan dan pendapatan daerah	2 laporan
Tersedianya laporan penerimaan daerah yang akurat dan akuntabel	- Jumlah laporan hasil rekonsiliasi penerimaan daerah	12 laporan
Tersedianya data penerimaan pendapatan daerah yang akurat dan akuntabel	- Jumlah data laporan penerimaan pendapatan daerah	12 buku laporan

<b>KABID PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Potensi sumber pendapatan Daerah	Persentase layanan informasi pajak daerah yang mutakhir dan akurat	100%
	Persentase potensi sumber pendapatan daerah yang diimplementasikan	1%
<b>KASUBBID PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN PAJAK DAERAH</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya sistem informasi PBB-P2 dan 9 Pajak dan Retribusi Daerah	- Jumlah sistem informasi pajak daerah yang dikelola	6 aplikasi
<b>KASUBBID PENGKAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya produk hukum pajak daerah	- Jumlah produk hukum pajak daerah yang diterbitkan	1 produk hukum
<b>KASUBBID PENYULUHAN DAN PROMOSI PAJAK DAERAH</b>		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemahaman WP melalui penyuluhan pajak	- Jumlah WP mengikuti penyuluhan	750 WP
Terlaksananya apresiasi terhadap WP dan Masyarakat	- Persentase pelaksanaan kajian pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah	100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 yang dijadikan target Tahunan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, sebagai berikut :

##### CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	5,1%	12,78%	250,59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61	77,70	101,34%
		- Nilai AKIP	62	68,13	109,89%

Pengukuran kinerja terhadap target indikator pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut :

#### 1. SASARAN 1 :

**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah** dengan Indikator Kinerja Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dengan target 5,1%.

Sebagai dasar untuk mengukur Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, dapat kita lihat tabel sebagai berikut:



**REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DAN PAD YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019**

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah			PAD yang dikelola BAPENDA		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Pajak Daerah</b>	<b>32.638.525.600,00</b>	<b>35.520.727.655,50</b>	<b>108,83</b>	<b>32.638.525.600,00</b>	<b>35.520.727.655,50</b>	<b>108,83</b>
	- Pajak Hotel	428.500.000,00	390.133.590,00	91,05	428.500.000,00	390.133.590,00	91,05
	- Pajak Restoran	2.075.118.000,00	3.673.861.506,00	177,04	2.075.118.000,00	3.673.861.506,00	177,04
	- Pajak Hiburan	13.400.000,00	3.700.000,00	27,61	13.400.000,00	3.700.000,00	27,61
	- Pajak Reklame	362.700.000,00	399.869.535,00	110,25	362.700.000,00	399.869.535,00	110,25
	- Pajak Penerangan Jalan	16.676.537.600,00	17.117.944.910,50	102,09	16.676.537.600,00	17.117.944.910,50	102,09
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.386.370.000,00	1.922.851.215,00	138,70	1.386.370.000,00	1.922.851.215,00	138,70
	- Pajak Air Bawah Tanah	52.620.000,00	22.871.825,00	43,47	52.000.000,00	22.871.825,00	43,47
	- Pajak Sarang Burung Walet	285.000.000,00	150.345.000,00	52,75	285.000.000,00	150.345.000,00	52,75
	- Pajak PBB P2	5.000.000.000,00	4.832.443.637,00	96,65	5.000.000.000,00	4.832.443.637,00	96,65
	- Pajak BPHTB	6.250.000.000,00	6.985.806.937,00	111,77	6.250.000.000,00	6.985.806.937,00	111,77
	- Pajak Parkir	17.280.000,00	20.899.500,00	120,95	17.280.000,00	20.899.500,00	120,95
2.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>2.120.500.000,00</b>	<b>2.407.147.348,00</b>	<b>113,52</b>	-	-	-
	- Retribusi Jasa Umum	715.000.000,00	703.015.600,00	98,32	-	-	-
	- Retribusi Jasa Usaha	680.500.000,00	877.971.200,00	129,02	-	-	-
	- Retribusi Perizinan Tertentu	725.000.000,00	826.160.548,00	113,95	-	-	-
3.	<b>Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>11.125.178.621,00</b>	<b>10.948.042.702,44</b>	<b>98,41</b>	-	-	-
	- Bank Jambi (Deviden)	9.900.320.000,00	9.741.805.664,65	98,40	-	-	-
	- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.224.858.621,00	1.206.237.037,79	98,48	-	-	-
4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>58.351.542.664,00</b>	<b>72.804.135.105,09</b>	<b>124,77</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.888.776,00</b>	<b>57,04</b>
	- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	323.000.000,00	1.703.408.500,00	527,37	-	-	-
	- Penerimaan Jasa Giro	5.555.268.874,00	2.177.642.123,58	39,20	-	-	-
	- Pendapatan Bunga Deposito	11.511.796.340,00	21.916.701.117,41	190,38	-	-	-
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	3.313.630,00	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	152.480.960,83	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda Pajak	4.000.000,00	1.888.776,00	47,22	4.000.000,00	1.888.776,00	47,22
	- Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Dari Pengembalian	3.759.931.570,00	5.579.361.537,27	148,39	-	-	-
	- Pendapatan BLUD pada FKTP	8.206.270.000,00	10.837.281.435,00	132,06	-	-	-
	- Pendapatan BLUD Rumah Sakit	28.991.275.880,00	30.432.057.025,00	104,97	-	-	-
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>104.235.746.885,00</b>	<b>121.680.052.811,03</b>	<b>116,74</b>	<b>32.642.525.600,00</b>	<b>35.522.616.431,50</b>	<b>108,83</b>

Untuk mengukur Tingkat Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dapat kita lihat pada Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2019 Sebesar Rp.121.680.052.811,03 dan Tahun 2018 sebesar Rp.107.888.139.228,52 di luar Dana Bos SD/SMP, sebagaimana formulasi perhitungan tingkat kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Rp. 121.680.052.811,03} - \text{Rp. 107.888.139.228,52}}{\text{Rp. 107.888.139.228,52}} \times 100 = 12,78\%$$

Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{12,78}{5,1} \times 100\% = 250,66\%$$

Jadi, tingkat kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dari target 5,1% terealisasi 12,78% dengan Capaian Kinerja 250,66%.

- **Persentase Peningkatan Penerimaan 9 Pajak Daerah dengan target 12,12%** (dikelola Bidang Pajak Daerah) Bidang Pajak Daerah mengelola 9 Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir.

Realisasi jumlah penerimaan 9 Pajak Daerah yang dikelola oleh Bidang Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp.23.702.477.801,50 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 21.589.904.423 terjadi peningkatan 9,79% dari target 12,12%, tidak tercapainya target ada beberapa pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai 100% antara lain :

- Pajak Hotel, ini disebabkan tingkat Hunian Hotel berkurang
- Pajak Hiburan, ini disebabkan Potensi Hiburan bersifat Insidental tidak ada penyelenggaraan seperti permainan anak-anak yang biasa diselenggarakan di gedung runtuh maupun di kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahkan ada penyelenggaraan hiburan sudah tutup seperti Permainan Bilyard.

- Pajak Air Bawah Tanah, ini disebabkan pelanggan air bawah tanah beralih menggunakan PDAM, dasar penagihan untuk perusahaan gas dan minyak menunggu NPA (Nilai Perolehan Air) yang sedang dalam tahap proses perhitungan nilai Invenstasi di bagi dengan umur Ekonomis untuk mendapatkan Nilai Air Baku
  - Pajak Sarang Burung Walet, ini disebabkan berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam, Betara dan Penakaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi.
- **Persentase Peningkatan Penerimaan PBB P2 dan BPHTB dengan target 0,74%** (dikelola Bidang PBB P2 dan BPHTB) Jumlah realisasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB Tahun 2019 sebesar Rp. 11.818.250.574 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 9.768.903.796,70 terjadi peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp. 2.049.346.777,30 atau 20,98% ini disebabkan terjadinya over target dari penerimaan BPHTB pada tahun 2019 sebesar 111,77%.
  - **Persentase Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu dan benar dengan target 100%** (dikelola Bidang Pengendalian dan Pelaporan)

Untuk mendapatkan Laporan Penerimaan Daerah yang valid Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah setiap awal bulan melakukan rekonsiliasi dengan 16 SKPD, Lembaga/Instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholder lainnya untuk mensinkronkan data penerimaan pada masing-masing pengelola pendapatan, sedangkan untuk pengendalian penerimaan pendapatan daerah, penerimaan dana transfer dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) namun sebagaimana salah satu tugas dan fungsi pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Subbidang Dana Transfer antara lain melakukan penyusunan rencana petunjuk dan pelaksana teknis, monitoring dan evaluasi penerimaan dana



transfer, pengumpulan data penyaluran dana transfer yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan yaitu Persentase Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu dan benar dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah, Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga, Pengolahan Data Pendapatan Daerah, Evaluasi Pelaporan Pendapatan dengan capaian 100%.

- **Persentase layanan informasi pajak daerah yang mutakhir dan akurat dengan target 100% dan Persentase potensi sumber pendapatan daerah yang diimplementasikan dengan target 1% (dikelola Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah)**

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas bidang pengembangan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, perhitungan potensi pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah serta penyusunan draft regulasi PAD. Pada tahun 2019 untuk Layanan informasi pajak daerah yang mutakhir dan akurat terealisasi 100% dengan tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah dengan memakai 6 Aplikasi antara lain : SISMIOP, BPHTB, SIMPEDA, SIMPAREDA, E-Payment dan Web Bapenda.

Sedangkan untuk potensi sumber pendapatan daerah yang diimplementasikan dengan realisasi 1% dengan tersedianya data potensi pajak daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yaitu melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah berupa kegiatan Uji Petik terhadap Objek Pajak Rumah Makan dan kegiatan Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah yaitu kegiatan Pemetaan OP PBB-P2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran berjalan.

## **2. SASARAN 2 :**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :**

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 76,61

Hasil Survei yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dari Bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 melalui pengisian Kuisisioner oleh 200 Responden dengan 9 unsur penilaian antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk / Hasil Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
9. Mekanisme Pengaduan Pelayanan

Dengan hasil perhitungan mendapatkan total nilai persepsi perunsur 5.597 dan Total Nilai unsur yang terisi 1.800 dikali dengan nilai penimbang 25 dengan formulasi:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$
$$IKM = \frac{5.597}{1.800} \times 25 = 77,70$$

Jadi, Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2019 terealisasi 77,70 dari target 76,61 dengan capaian kinerja 101,34%.

- Nilai AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan, Implementasi Pelaporan dan Evaluasi SAKIP Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari target Nilai 62 terealisasi 68,13 dengan capaian 109,89%.

## 1. CAPAIAN KINERJA BAPENDA TAHUN 2019

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 32.638.525.600,00 terealisasi sebesar Rp. 35.520.727.655,50 dengan capaian 108,83 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 428.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 390.133.590,00 dengan capaian 91,05 %
2. Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 2.075.118.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.673.861.506,00 dengan capaian 177,04 %
3. Pajak Hiburan dari target sebesar Rp. 13.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.700.000,00 dengan capaian 27,61 %
4. Pajak Reklame dari target sebesar Rp. 362.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 399.869.535,00 dengan capaian 110,25 %
5. Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 16.767.537.600,00 terealisasi sebesar Rp. 17.117.944.910,50 dengan capaian 102,09 %



6. Pajak Parkir dari target sebesar Rp. 17.280.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.899.500,00 dengan capaian 120,95 %
7. Pajak Air Bawah Tanah dari target sebesar Rp. 52.620.000,00 terealisasi sebesar Rp. 22.871.825,00 dengan capaian 43,475 %
8. Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 285.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 150.345.000,00 dengan capaian 52,75 %
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target sebesar Rp. 1.386.370.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.922.851.215,00 dengan capaian 138,70 %
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari target sebesar Rp. 5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.832.443.637,00 dengan capaian 96,65 %
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebesar Rp. 6.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.985.806.937,00 dengan capaian 111,77%

**2. CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DARI TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2019**

Capaian Kinerja Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2016 sampai dengan 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2016 sampai dengan 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD				Realisasi Kinerja Sasaran PAD				Capaian Kinerja Sasaran PAD			
			Tahun I 2016	Tahun II 2017	Tahun III 2018	Tahun IV 2019	Tahun I 2016	Tahun II 2017	Tahun III 2018	Tahun IV 2019	Tahun I 2016	Tahun II 2017	Tahun III 2018	Tahun IV 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan PAD	6%	0,21%	2%	5,10%	26,27%	22,46%	2,57%	12,78%	437,83%	10.695,24%	128,50%	250,59%
		- Persentase Peningkatan Penerimaan 9 Pajak Daerah	10%	8,11%	10%	12,12%	22,87%	23,49%	11,02%	9,79%	228,70%	289,64%	110,20%	80,78%
		- Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2 dan BP-HTB	10%	0,18%	0,51%	0,74%	71,50%	-33,20%	24,93%	20,98%	715,00%	-18.444,44%	4.888,24%	2.835,14%
		- Persentase Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu dan Benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase Potensi Sumber Pendapatan Daerah yang di Implementasikan	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	76,67	-	-	-	77,70	-	-	-	101,34%
		- Persentase Pemenuhan Komponen IKM	-	-	-	90%	-	-	-	90%	-	-	-	100%
		- Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
		- Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%

## Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	2016				2017				2018				2019			
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)		
1.	Pajak Daerah	22.437.453.350,00	27.471.061.609,28	122,43	25.372.310.306,00	27.267.183.231,75	106,63	27.233.817.104,09	31.284.008.219,70	115,16	32.638.523.000,00	30.528.127.025,50	100,03				
	- Pajak Hotel	150.000.000,00	103.422.250,00	108,95	165.000.000,00	211.586.705,00	128,23	373.739.000,00	603.149.255,00	161,18	428.500.000,00	190.133.390,00	91,05				
	- Pajak Restoran	1.615.000.000,00	2.278.663.890,00	141,59	1.945.000.000,00	3.419.556.797,00	82,84	2.010.000.000,00	3.279.962.126,00	163,18	2.075.118.000,00	3.573.861.306,00	177,04				
	- Pajak Hiburan	0.000.000,00	3.131.400,00	24,78	13.700.000,00	3.970.000,00	28,98	20.700.000,00	8.265.000,00	39,93	13.600.000,00	3.790.000,00	27,61				
	- Pajak Reklame	270.000.000,00	551.317.558,00	150,12	330.000.000,00	339.432.801,00	102,86	355.000.000,00	248.790.857,00	97,41	563.700.000,00	399.869.435,00	110,25				
	- Pajak Penertangan Jalan	10.690.510.750,00	11.860.117.666,78	108,32	12.442.167.000,00	15.070.247.897,00	125,94	13.530.000.000,00	16.217.634.747,00	120,6	15.676.537.600,00	17.117.944.910,20	102,09				
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	965.000.000,00	1.059.531.258,50	118,16	1.316.367.000,00	1.358.399.057,50	103,19	1.366.367.000,00	841.012.365,00	61,55	1.386.370.000,00	1.022.851.215,00	138,7				
	- Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	25.146.025,00	100,59	40.000.000,00	20.266.775,00	71,17	52.000.000,00	27.300.816,00	52,31	52.820.000,00	22.871.823,00	43,47				
	- Pajak Energi Listrik	210.000.000,00	277.303.300,00	132,03	210.000.000,00	215.105.100,00	102,43	270.000.000,00	162.569.633,00	60,21	248.000.000,00	150.345.600,00	52,75				
	- Pajak BPHTB	3.062.953.500,00	7.200.745.489,00	235,09	3.600.000.000,00	3.012.022.975,25	87,41	1.600.000.000,00	3.089.395.405,70	141,37	6.250.000.000,00	6.386.805.977,00	111,77				
	- PBB PD	5.340.000.000,00	4.521.983.932,00	82,22	5.500.000.000,00	4.897.575.660,00	83,67	3.650.000.000,00	4.079.308.370,00	82,82	5.020.000.000,00	4.832.443.637,00	96,65				
	- Pajak Pabrik	-	-	-	-	-	-	3.940.000,00	4.330.000,00	109,99	17.280.000,00	20.899.200,00	120,95				
2.	Berhasil Daerah	21.645.625.020,00	23.852.176.872,00	96,24	5.987.241.997,00	5.332.246.500,00	94,29	1.495.492.000,00	2.484.338.605,00	99,45	2.130.500.000,00	2.497.187.240,00	112,22				
	- Bantuan Jasa Umum	20.213.025.028,00	19.001.924.066,00	94,01	4.046.341.997,00	4.112.584.407,00	101,64	910.000.000,00	844.699.600,00	92,81	715.000.000,00	703.015.600,00	98,32				
	- Bantuan Jasa Usaha	460.000.000,00	620.261.710,00	134,84	623.000.000,00	812.923.807,00	131,93	780.400.000,00	921.151.800,00	118,04	680.500.000,00	877.971.200,00	129,02				
	- Retribusi Pendidikan, Kesehatan, Budaya dan Nันทนาการ	972.400.000,00	1.230.991.096,00	126,55	1.278.000.000,00	798.608.597,00	62,44	805.000.000,00	718.376.905,00	89,24	725.000.000,00	426.106.548,00	113,95				
3.	Realisasi Kegiatan Daerah yang Dipertahankan	8.712.576.330,00	8.712.576.330,00	100	8.981.264.971,00	10.104.675.104,50	101,23	9.981.264.971,00	10.230.377.311,40	101,49	11.158.178.421,00	10.940.042.702,44	98,41				
	- Bank Swabi (Dewiolen)	8.092.897.350,00	8.092.897.350,00	100	8.981.264.971,00	8.984.290.023,06	100,03	8.981.264.971,00	9.239.841.116,40	102,88	9.950.320.100,00	9.741.805.464,65	98,40				
	- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang Tidak Dipertahankan	619.678.980,00	619.678.980,00	100	1.000.000.000,00	1.119.385.081,50	111,98	1.000.000.000,00	1.180.536.194,56	118,95	1.234.858.421,00	1.206.237.077,79	98,48				
4.	Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah	30.392.804.354,00	26.855.833.096,49	95,07	41.830.337.417,00	62.080.006.240,00	148,43	84.503.801.706,00	103.468.695.074,42	122,59	58.251.543.164,00	72.304.135.105,09	124,77				
	- Hasil Pengukuran Aset Daerah yang Tidak Dipertahankan	1.468.090.000,00	540.081.320,00	36,83	760.000.000,00	397.481.200,00	51,77	870.298.502,00	827.102.483,00	122,83	323.000.000,00	1.701.408.300,00	327,37				
	- Penerimaan Asli Cita	3.463.000.000,00	1.644.520.851,50	102,29	5.504.709.384,00	3.026.494.131,00	54,98	1.000.000.000,00	1.425.528.046,62	142,55	5.515.266.874,00	2.177.642.123,58	30,2				



	- Pendekatan Biaya Depresiasi	3.801.677.683,00	7.140.938.953,00	180,16	6.507.350.000,00	20.838.097.933,01	302,23	9.367.768.128,00	15.060.257.315,28	165,06	11.811.796.340,00	21.316.701.117,41	190,38
	- Timbulan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.313.010,00	-
	- Pendekatan Denda atas Kezantunan Pelaksanaan Pekerjaan	-	413.595.721,21	-	-	-	-	14.101.408,00	1.180.941.204,17	8.174,63	-	152.480.160,83	-
	- Pendekatan Denda Pajak	3.800.000,00	3.000.000,00	67,89	3.500.000,00	3.274.696,00	36,42	4.000.000,00	2.281.590,00	57,34	4.000.000,00	1.888.176,00	47,22
	- Pendekatan Denda Pertribusi	25.000.000,00	225.601.786,00	902,41	30.000.000,00	26.212.804,00	67,38	-	-	-	-	-	-
	- Pendekatan Dedi Pengembalian	12.433.974.671,00	8.543.386.540,78	67,1	3.180.000.000,00	16.156.233.207,92	341,47	3.140.000.000,00	13.613.143.112,25	432,23	3.799.931.170,00	6.375.561.377,27	146,39
	- Pendekatan BLUD pada PKTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.296.370.100,00	132,06
	- Dana Kegiatan JKS pada PKTP	9.038.818.000,00	8.493.872.450,00	93,78	7.540.000.000,00	7.448.077.200,00	102,23	7.990.000.000,00	8.039.600.199,00	100,67	-	-	-
	- Pendekatan BLUD Zureah Selah	-	-	-	17.010.697.533,00	19.479.234.786,00	106,41	24.189.398.407,00	21.781.301.501,00	90,07	28.991.275.880,00	36.432.097.025,00	104,97
	- Dana ECOS SD/SMP	-	-	-	-	-	-	57.823.200.000,00	40.052.286.000,00	105,89	-	-	-
	<b>Jumlah PAB</b>	<b>13.460.147.972,00</b>	<b>85.851.667.770,74</b>	<b>102,3</b>	<b>83.531.255.191,00</b>	<b>105.083.811.203,39</b>	<b>136,23</b>	<b>124.272.336.571,09</b>	<b>147.540.419.228,82</b>	<b>119,95</b>	<b>168.218.746.388,00</b>	<b>121.600.682.811,63</b>	<b>115,51</b>
5.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>827.594.498.417,00</b>	<b>1.619.466.188.966,20</b>	<b>112,14</b>	<b>908.006.241.970,00</b>	<b>1.037.376.490.573,00</b>	<b>107,1</b>	<b>929.370.808.000,00</b>	<b>1.696.220.881.889,00</b>	<b>114,28</b>	<b>1.280.378.174.230,00</b>	<b>1.306.126.943.113,00</b>	<b>103,64</b>
	- Bagi Hasil Pajak	112.796.583.660,00	137.284.107.200,00	121,71	80.815.053.064,00	115.540.653.279,00	128,06	85.027.924.000,00	109.796.317.817,00	97,04	124.954.771.000,00	117.801.645.301,00	94,12
	- Bagi Hasil Bukan Pajak-SDA	228.544.560.215,00	239.123.323.666,00	128,26	237.377.960.870,00	294.157.606.335,60	124,17	159.550.903.000,00	298.157.606.316,00	174,49	423.803.477.238,00	489.204.722.923,00	115,17
	- Dana Alokasi Utama (DAU)	451.796.019.312,00	597.980.255.200,00	112,19	536.985.288.000,00	506.189.288.000,00	100	505.889.288.000,00	506.466.327.157,00	99,98	536.177.694.100,00	506.177.694.000,00	100
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	133.489.730.200,00	111.078.802.110,00	83,23	134.805.997.000,00	120.588.962.968,00	89,75	147.210.260.000,00	142.743.764.045,00	96,97	179.239.230.000,00	103.322.840.860,00	93,22
	<b>Lain-lain Pendapsan Daerah Yang Sah</b>	<b>113.403.437.261,00</b>	<b>158.328.499.999,26</b>	<b>92,88</b>	<b>143.038.853.027,00</b>	<b>156.833.816.053,24</b>	<b>109,60</b>	<b>133.817.080.000,00</b>	<b>147.096.403.707,83</b>	<b>109,98</b>	<b>228.727.138.684,26</b>	<b>216.131.718.263,97</b>	<b>97,97</b>
	- Pendapsan Hibah	-	-	-	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100	-	-	-	51.641.200.000,00	46.864.800.000,00	76,25
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	41.923.177.233,00	33.648.239.999,26	80,74	37.750.859.327,00	45.004.123.053,34	119,28	41.862.146.123,00	69.911.489.707,53	120,09	65.872.130.594,56	60.873.030.509,97	100
	- Dana Penanaman dan Operasi Khasa	71.480.260.000,00	71.480.260.000,00	100	50.349.600.000,00	90.349.600.000,00	160	-	-	-	106.213.808.000,00	106.213.808.000,00	109
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	11.040.000.000,00	11.040.000.000,00	100	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100	-	8.040.000.000,00	-
	- Dana Desa	-	-	-	-	-	-	89.944.914.000,00	89.944.914.000,00	100	-	-	-
6.	<b>Jumlah Perimbangan</b>	<b>6.134.146.265.873,00</b>	<b>13.210.086.333.944,00</b>	<b>110,27</b>	<b>1.199.569.649.480,00</b>	<b>1.350.431.117.828,73</b>	<b>108,19</b>	<b>1.232.197.019.871,30</b>	<b>1.392.046.766.925,65</b>	<b>112,19</b>	<b>1.805.100.090.617,56</b>	<b>1.645.638.714.427,00</b>	<b>103,7</b>

### 3. ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KENAIKAN DAN PENURUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN DAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019**

NO.	JENIS PENERIMAAN	2019		ALASAN
		TARGET	REALISASI %	
<b>A.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>32.638.525.600,00</b>	<b>35.520.727.655,50</b>	
<b>1.</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>428.500.000,00</b>	<b>390.133.590,00</b>	Pajak Hotel terealisasi sebesar 91,05%.
	Hotel Melati Satu	400.000.000,00	375.696.090,00	Pajak Hotel mengalami penurunan dalam Penerimaan Pendapatan khususnya Pajak Hotel disebabkan tingkat Hunian Hotel berkurang. Adapun upaya yang akan dilakukan antara lain menghimbau para pemilik hotel untuk memberikan jaminan rasa aman, pelayanan dan kenyamanan bagi para konsumen / pelanggan, agar instansi terkait dan Pihak Perhotelan lebih gencar mempromosikan dalam kaitan Perhotelan dan Kepariwisataan.
	Loemen/Rumah Penginapan/Pesunggrahan/Rumah Kos	28.500.000,00	14.437.500,00	50,66
<b>2.</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>2.075.118.000,00</b>	<b>3.673.861.506,00</b>	<b>177,04</b>
	Rumah Makan	1.619.437.000,00	2.796.456.563,00	172,68
	Kantin	455.681.000,00	877.404.933,00	192,55
				Terjadi peningkatan / Over target sebesar 77,04%
				Terjadi peningkatan pembayaran pajak catering oleh PT. Patra SS dan PT. Bashitu Boga Tama serta Pembayaran makan minum lainnya
				<b>Solusi yang perlu ditingkatkan</b>
				1. Untuk lebih membuka peluang dunia usaha kuliner baik yang bersifat perorangan maupun yang berbentuk Badan Usaha
				2. Melakukan uji pelik terhadap restoran / rumah makan dan melaksanakan penyuluhan atas kepatuhan wajib pajak untuk memberikan laporan sesuai dengan omzet yang didapat dalam perhitungan setiap bulannya
<b>3.</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>27,61</b>
	Permainan Bilyard	2.400.000,00	850.000,00	35,42
	Pusat Kebugaran (Fitness Center)	6.000.000,00	1.900.000,00	31,67
	Pertandingan Olah Raga	-	-	-
	Tempat Wisata	-	-	-
	Penyelenggaraan Hiburan Insidentil	5.000.000,00	950.000,00	19,00
				Pajak Hiburan terealisasi sebesar 27,61% :
				Pajak Hiburan mengalami penurunan dalam Penerimaan Pendapatan khususnya Pajak Hiburan disebabkan Potensi Hiburan bersifat insidentil tidak ada penyelenggaraan seperti permainan anak-anak yang biasa diselenggarakan di gedung runtuh maupun di kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahkan ada penyelenggaraan hiburan sudah tutup seperti Permainan Bilyard. Upaya yang dilakukan, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan tempat wisata dan hiburan yang ada serta memberikan peluang ke-acad para pengusaha hiburan dan mengintensifkan pelayanan pajak daerah.



NO.	JENIS PENERIMAAN	2019			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
4.	<b>Pajak Reklame</b> Reklame Papan/Bali Board/Video/Sign/Megatron Reklame Kain/Spanduk	362.700.000,00 314.700.000,00 48.000.000,00	399.869.535,00 367.290.925,00 32.578.610,00	110,25 116,71 67,87	Terjadi peningkatan/over target sebesar 10,25% disebabkan Artulas pembayaran pajak pemasangan reklame, dan tempat usaha meningkat dikarenakan adanya kegiatan penertiban reklame <b>Solusi yang perlu ditingkatkan</b> 1. Lebih meningkatkan penegahan dilapangan 2. Meningkatkan pengawasan terhadap pemasangan reklame 3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban reklame untuk wilayah Kab. Tanjungbar
5.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b> Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN	16.767.537.600,00 11.263.000.000,00 5.504.537.600,00	17.117.944.910,50 12.089.341.559,00 5.028.603.351,50	102,09 107,34 91,35	Terjadi peningkatan/ over target sebesar 2,09% disebabkan Peningkatan dari PPJ PLN, adanya penambahan pelanggan sedangkan PPJ Non PLN pembayaran oleh Petro China sampai akhir tahun 2019 Triwulan ke Tiga belum masuk <b>Solusi yang perlu ditingkatkan</b> 1. Koordinasi dengan pihak PLN lebih ditingkatkan 2. Laporan pemakalan KWH oleh Perusahaan semakin lancar 3. Kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk membayar PPJ
6.	<b>Pajak Parkir</b>	17.280.000,00	20.899.500,00	120,95	Terjadi peningkatan/ over target sebesar 20,95% disebabkan Lancarnya pembayaran oleh wajib pajak parkir seperti Indomaret, bank pemrintah, bank swasta, swalayan dan hotel pembayarannya fluktuatif sesuai dengan tamu hotel dimaksud <b>Solusi yang perlu ditingkatkan</b> Untuk lebih meningkatkan pendapatan potensi pajak parkir
7.	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	52.620.000,00	22.871.825,00	43,47	Pajak Air Bawah Tanah realisasi sebesar 43,47% Pajak Air Bawah Tanah mengalami penurunan disebabkan pelanggan air bawah tanah beralih menggunakan PDAM, dasar penagihan untuk perusahaan gas dan minyak manunggu NPA (Nilai Perolehan Air) yang sedang dalam tahap proses perhitungan nilai Invenstasi di bagi dengan umur Ekonomis untuk mendapatkan Nilai Air Baku. Upaya yang akan dilakukan, meningkatkan pendataan para pemilik sumur bor khususnya perusahaan yang menggunakan air bawah tanah.
8.	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	285.000.000,00	150.345.000,00	52,75	Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet realisasi sebesar 52,75% : Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet mengalami penurunan di sebabkan berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kecamatan Tungkai Ilir, Bram Ilam, Belara dan Penekaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi. Solusi yang akan dilakukan pendataan terhadap Objek Pajak Burung Walet di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Barat yang mempunyai potensi perkembangan penakaran Sarang Burung Walet serta akan dilakukan sosialisasi terhadap pemilik penakaran sarang burung walet khususnya bagi Wajib Pajak baru yang ada di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



NO.	JENIS PENERIMAAN	2019			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir Tanah Liat Kerikil Batu Split Tanah Urug Tanah Lateralik	1.386.370.000,00 80.000.000,00 2.000.000,00 262.000.000,00 222.000.000,00 653.000.000,00 167.370.000,00	1.922.851.215,00 135.152.275,00 10.724.000,00 47.318.865,00 405.569.775,00 1.295.544.350,00 28.541.950,00	138,70 168,94 536,20 18,06 182,69 198,40 17,05	Terjadi peningkatan sebesar 38,70% disebabkan Pengambilan dan penamtangan sumber daya alam berupa penambangan tanah urug, penambangan batuan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat <b>Solusi yang perlu ditingkatkan</b> 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penambangan perlu peningkatan 2. Koordinasi dengan instansi berwenang dalam pemberian izin penambangan perlu ditingkatkan
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan Perkotaan	5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00	4.832.443.637,00 3.835.908.695,00 996.534.941,00	96,65 127,86 49,83	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan teresa asasi sebesar 96,65% :  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tidak mencapai target di sebabkan adanya Data tidak valid, Objek Pajak tidak ditemukan dan adanya SPPT ganda. Adapun upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak serta Koordinasi dengan Camat, Lurah, Kades dan RT
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.250.000.000,00	6.985.806.937,00	111,77	Terjadi peningkatan sebesar 11,77% disebabkan adanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dibayar oleh perusahaan perkebunan <b>Solusi yang perlu ditingkatkan</b> Melakukan inventarisasi terhadap perusahaan yang belum melakukan balik nama
B.	RETRIBUSI DAERAH	2.120.500.000,00	2.407.147.348,00	113,52	
12.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	715.000.000,00 115.000.000,00 90.000.000,00 110.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00	703.015.600,00 116.941.600,00 4.995.000,00 110.358.000,00 154.103.000,00 316.638.000,00	98,32 101,69 5,55 100,31 102,74 126,66	OPD Dinas Lingkungan Hidup  OPD Dinas Perhubungan  OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi OPD Dinas Perhubungan OPD Dinas Kominfo
13.	Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Alat-Alat Berat (Dinas PU) - Sewa Gedung / Aula dan Asrama	680.500.000,00 600.500.000,00 112.500.000,00 50.000.000,00	877.971.200,00 776.147.200,00 142.700.000,00 96.750.000,00	129,02 129,25 126,84 193,50	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	JENIS PENERIMAAN	2019			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
	- Sewa Gedung Eks Serbaguna - Sewa Water Front City (WFC) - Sewa GOR Bulutangkis - Sewa Mess Pemda Tanjung Barat di Jambi - Sewa Alat-Alat Berat (Dinas Perikanan) - Sewa Kendaraan Dinas Bus - Pemakaian Kekayaan Pemda (Tanah Pemda) - Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	20.000.000,00 - - 35.000.000,00 70.000.000,00 37.000.000,00 146.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 500.000,00 3.200.000,00 35.370.000,00 208.000.000,00 29.850.000,00 43.088.000,00 204.689.200,00 2.000.000,00	50,00 - - 101,06 297,14 80,68 29,51 204,69 6,67	OPD Sekretariat Daerah OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga OPD Sekretariat Daerah OPD Dinas Perikanan OPD Sekretariat Daerah OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah OPD Dinas Perhubungan OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Retribusi Terminal - Peron - Bus Kecil (Angkutan Umum dengan Penumpang 1 s.d 8 Orang) - Angkutan Barang Pick Up - Angkutan Barang Truk Engel - Angkutan Barang Truk Besar - Angkutan Pedesaan (Bus Kecil) - Retribusi Jasa Tempat / Ruangan Retribusi Khusus Parkir	80.000.000,00 - - - - - - - -	101.824.000,00 - - 6.816.000,00 63.935.000,00 31.073.000,00 - - -	- 127,28 - - - - - - -	OPD Dinas Perhubungan
14.	Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Retribusi Gengguan / HO Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Perpanjangan IMTA	725.000.000,00 270.000.000,00 - - 5.000.000,00 450.000.000,00	826.160.548,00 254.561.748,00 - - - 571.598.800,00	113,95 94,28 - - - 127,02	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang OPD Dinas Perikanan OPD Dinas Tenaga Kerja

NO.	JENIS PENERIMAAN	2019			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
C.	HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	11.125.178.621,00	10.948.042.702,44	98,41	
15.	Bank Jambi ( Deviden)	9.900.320.000,00	9.741.805.664,65	98,40	
16.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.224.858.621,00	1.206.237.037,79	98,48	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
D.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	58.351.542.664,00	72.804.135.105,09	124,77	
17.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Di Pisahkan	323.000.000,00	1.703.408.500,00	527,37	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Penerimaan Jasa Giro	5.555.268.874,00	2.177.642.123,58	39,20	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Pendapatan Bunga Deposito	11.511.796.340,00	21.916.701.117,41	190,38	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
20.	Kerugian Barang Daerah	-	3.313.630,00	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	152.480.960,83	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Pendapatan Denda Pajak	4.000.000,00	1.888.776,00	47,22	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
23.	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	
24.	Pendapatan Dari Pengembalian	3.759.931.570,00	5.579.361.537,27	148,39	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
25.	Pendapatan BLUD Pada FKTP	8.206.270.000,00	10.837.281.435,00	132,06	OPD Dinas Kesehatan
26.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	28.991.275.880,00	30.432.057.025,00	104,97	OPD Dinas Kesehatan



## Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2019

No.	Jenis Penerimaan	2019		Alasan
		Target	Realisasi %	
<b>1.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak</b>	<b>1.260.205.174.228,00</b>	<b>1.306.126.943.112,00</b>	<b>103,64</b>
	a. Perkebunan	548.818.250.228,00	606.626.368.244,00	110,53
	b. Pertambangan	124.954.773.000,00	117.601.645.321,00	94,12
	c. Migas	7.820.333.000,00	7.668.086.190,00	98,05
	d. Non Migas/Pertambangan Umum (Batu Bara)	4.153.404.000,00	3.555.945.853,00	85,62
	e. Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Daerah	99.048.970.000,00	95.383.360.854,00	96,30
	f. BP PBB	6.729.000,00	30.365.476,00	451,26
	g. PPh 21	3.753.163.000,00	3.578.929.355,00	95,36
	h. PPh 25 & 29	3.334.580.000,00	3.202.105.233,00	96,03
		6.684.261.000,00	4.010.556.600,00	60,00
		153.353.000,00	172.295.560,00	112,37
<b>2.</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</b>	<b>423.963.477.228,00</b>	<b>489.024.722.923,00</b>	<b>115,37</b>
	a. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan (IU/PH)	-	-	-
	b. Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (FSDH)	4.279.952.000,00	4.000.244.317,00	93,46
	c. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR)	-	-	-
	d. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	657.062.000,00	460.081.956,00	70,02
	e. Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Exploitas (Royalti)	8.077.807.000,00	10.688.180.008,00	132,32
	f. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	983.593.000,00	689.340.471,00	70,08
	g. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	-	-	-
	h. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	152.686.045.000,00	142.177.404.981,00	93,12
	i. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	256.927.653.298,00	330.746.738.340,00	128,73
	j. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	251.364.930,00	262.732.850,00	104,52
<b>4.</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>536.177.694.000,00</b>	<b>536.177.694.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>175.209.230.000,00</b>	<b>163.322.880.868,00</b>	<b>93,22</b>
	a. DAK Fisik	84.365.908.000,00	80.318.916.744,00	95,20
	b.			
	c. DAK Non Fisik	90.843.322.000,00	83.003.964.124,00	91,37

## Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Terhadap Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2019

No.	Jenis Penerimaan	2019			Alasan
		Target	Realisasi	%	
1.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah dari Dana Bos	220.727.488.504,56	216.031.718.503,97	97,87	
		53.641.200.000,00	40.904.880.000,00	76,26	
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan Pemantauan Air Permukaan e. Bagi Hasil dari Pajak Rokok - Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten a. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Penyesuaian a. Dana Desa dan Desa Adat	60.872.130.504,56	60.873.030.503,97	100,00	Pelaksanaan Transfer telah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD 2019 dan sesuai dengan perda 11/2011 tentang pajak Daerah dan Pergub 23/2017 tentang tata cara Pembagian hasil penerimaan pajak pemerintah Provinsi.
		60.872.130.504,56	60.872.130.504,56	100,00	
		10.980.181.893,42	30.519.145.902,02	277,95	
		10.250.340.958,72	6.547.460.437,62	63,88	
		23.644.481.174,25	11.077.606.331,55	46,85	
		352.136.451,92	129.734.325,31	36,84	
3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi a. Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Desa dan Kelurahan b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Air Berat dan/atau Pendukung Lainnya	15.644.990.026,25	12.598.183.507,47	80,35	Pelaksanaan Transfer alokasi Bantuan Provinsi sebagaimana yang diamanatkan dalam pergub Nomor 37/2018 tentang pedum bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan namun tidak dialokasikan dalam APBD 2019.
		-	900.000,00	-	
		-	900.000,00	-	
		106.213.808.000,00	106.213.808.000,00	100,00	
		106.213.808.000,00	106.213.808.000,00	100,00	
		-	8.040.000.000,00	-	
		-	8.040.000.000,00	-	
		-	-	-	

## ❖ **Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan, dari tabel Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2019 diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Rp.1.240.686.353.744,10, Tahun 2017 Rp.1.293.454.117.828,73, Tahun 2018 sebesar Rp.1.392.066.704.925,05 dan Tahun 2019 Rp.1.643.838.714.427,00. Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016-2019 cukup signifikan, Realisasi PAD tahun 2016 Sebesar Rp. 85.891.667.778,74 mengalami peningkatan 26,27% dari tahun sebelumnya dengan target 6%, tahun 2017 Sebesar Rp. 105.183.810.752,39, terjadi peningkatan 22,46% dari target 0,21%, Tahun 2018 Penerimaan PAD diluar Penerimaan Dana BOS SD/SMP terealisasi Rp.107.888.139.228,52 Terjadi Peningkatan 2,57% dari Target 2%, sedangkan untuk Tahun 2019 Realisasi PAD sebesar Rp.121.680.052.811,03 terjadi peningkatan 12,78% dari Penerimaan PAD Tahun lalu.

### **2. Dana Perimbangan**

Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2016-2019 mengalami Fluktuasi, tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu terealisasi sebesar Rp. 1.049.466.185.966, Tahun 2017 terealisasi Rp.1.037.376.490.573, Tahun 2018 Terealisasi Sebesar Rp.1.096.229.881.989 dan Tahun 2019 Terealisasi Sebesar Rp.1.306.126.943.112. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).



### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.105.328.499.999,36 sedangkan pada Tahun 2017 terealisasi Rp.150.893.816.053,34, Tahun 2018 Terealisasi Rp.147.896.403.707,53 dan Tahun 2019 Terealisasi Rp.216.031.718.503,97.

### 4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi			Jumlah	Kinerja (%)
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah (HO)	Lain-lain PAD yang sah		
2016	27.471.080.669,28	441.042.300,00	227.638.429,00	28.139.761.398,28	40,44
2017	27.267.183.231,75	217.810.453,00	21.487.592,00	27.506.481.276,75	-2,25
2018	31.358.808.219,70	-	2.281.590,00	31.361.089.809,70	14,01
2019	35.520.727.655,50	-	1.888.776	35.522.616.431,50	13,27

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 – 2019 juga mengalami fluktuasi untuk tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 40,44%, ini disebabkan penerimaan dari pajak BPHTB mengalami peningkatan dari target Rp.3.062.955.500 terealisasi sebesar Rp.7.200.743.489 atau 235,09%, tahun 2017 dari target Rp.25.905.710.806 terealisasi sebesar Rp.27.506.481.276,75 atau 106,18%, dibanding Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,25%. Tahun 2018 kembali mengalami kenaikan dari Target Rp.27.235.817.894 Terealisasi Rp.31.361.089.809 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 14,01% dan Tahun 2019 dari Target Rp. 32.642.525.600 Terealisasi Rp. 35.522.616.431,50 terjadi peningkatan 13,27% dari tahun lalu.

## 5. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2016	1.240.686.353.744,10	85.891.667.788,74	6,93	28.139.761.398,28	2,27
2017	1.293.454.117.378,73	105.183.810.752,39	8,14	27.506.481.276,75	2,13
2018	1.392.066.704.925,05	147.940.419.228,52	10,63	31.361.089.809,70	2,25
2019	1.642.378.258.284,00	120.219.596.668,03	7,32	35.522.616.431,50	2,16

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2016 – 2019 berkisar antara 6 – 10%, sedangkan Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2016 – 2019 hanya berkisar diatas 2%, untuk tahun 2019 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 7,32%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 2,16%.

Pada Tahun 2019 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebesar Rp.1.643.838.714.427, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp.121.680.052.811,03 dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebesar Rp.35.522.616.431,50. Jadi kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Pendapatan Daerah tahun 2019 Sebesar 7,40% sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 Sebesar 2,16%. Untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi peningkatan 12,78% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2019 Sebesar 5,1%.

#### 4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh Sumber Daya antara lain Sumber Daya Aparatur, Sarana Prasarana dan Pendanaan.

##### ➤ Sumber Daya Aparatur

Personil Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 sejumlah 122 orang yang terdiri dari 45 orang PNS, 5 orang CPNS dan 72 orang tenaga kerja kontrak (TKK) yang didistribusikan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Bidang	PNS	CPNS	TKK/TKS	Jumlah
1.	Sekretariat	15 Orang	-	26 Orang	41 Orang
2.	Pajak Daerah	7 Orang	3 Orang	14 Orang	24 Orang
3.	PBB-P2 dan BPHTB	11 Orang	2 Orang	17 Orang	30 Orang
4.	Pengendalian dan Pelaporan	5 Orang	-	7 Orang	12 Orang
5.	Pengembangan Pendapatan Daerah	7 Orang	-	8 Orang	15 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>45 Orang</b>	<b>5 Orang</b>	<b>72 Orang</b>	<b>122 Orang</b>

Pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah mendapat tambahan personil dari hasil seleksi penerimaan CPNS yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 5 Orang sesuai dengan Formasi yang diusulkan oleh Bapenda sebagai Tenaga Fungsional Calon Pemeriksa Pajak Ahli Pertama 3 Orang dan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 2 Orang dan sudah didistribusikan ke Bidang Pajak Daerah 3 Orang sebagai Pemeriksa Pajak dan Bidang PBB-P2 dan BPHTB 2 Orang sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.



## ➤ Sarana Prasarana

Pada saat ini Kantor Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2019 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

### Neraca Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2019

No	Akun Neraca	Nilai BMD Periode 31 Desember 2019			
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Kurang	Tambah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
<b>I</b>	<b>POSISI BMD DI NERACA</b>	<b>26.902.648.378,00</b>	<b>1.948.523.312,00</b>	<b>1.381.487.686,00</b>	<b>27.469.684.004,00</b>
<b>A.</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>165.746.460,00</b>	<b>936.899.200,00</b>	<b>716.173.660,00</b>	<b>386.472.000,00</b>
1.	Persediaan	165.746.460,00	936.899.200,00	716.173.660,00	386.472.000,00
<b>B.</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>25.305.185.198,00</b>	<b>813.268.806,00</b>	<b>236.547.306,00</b>	<b>25.881.906.698,00</b>
1.	Tanah	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	9.528.220.798,00	322.852.500,00	-	9.851.073.298,00
3.	Gedung dan Bangunan	15.712.204.400,00	215.677.000,00	-	15.927.881.400,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.760.000,00	-	-	64.760.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	-	236.547.306,00	236.547.306,00	-
6.	Konstruksi Dalam Pengejaan (KDP)	-	38.192.000,00	-	38.192.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	8.618.585.194,00	1.048.383.419,00	-	9.666.968.613,00
<b>C.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.431.716.720,00</b>	<b>198.355.306,00</b>	<b>428.766.720,00</b>	<b>1.201.305.306,00</b>
1.	Aset Tak Berwujud	974.800.000,00	198.355.306,00	-	1.173.155.306,00
2.	Aset Lain-Lain	456.916.720,00	-	428.766.720,00	28.150.000,00
<b>II</b>	<b>BMD NON NERACA</b>	<b>13.746.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.746.000,00</b>
<b>A.</b>	<b>EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>13.746.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.746.000,00</b>
1.	BMD Ekstrakomptabel	13.746.000,00	-	-	13.746.000,00
	<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>26.916.394.378,00</b>	<b>1.948.523.312,00</b>	<b>1.381.487.686,00</b>	<b>27.483.430.004,00</b>

## ➤ Pendanaan

Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 16.116.507.869 terealisasi Rp. 14.908.830.528 atau 92,51% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi dari anggaran Rp. 15.310.807.869 terealisasi Rp. 14.133.753.722 atau 92,31% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.177.054.147 atau 7,69%.
2. Belanja Modal dari anggaran Rp. 805.700.000 terealisasi Rp. 775.076.806 atau 96,20% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 30.623.194 atau 3,80%.

## 5. PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 melaksanakan 6 program dan 46 kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2019

No	Program	Anggaran		Realisasi		Fisik (%)
		Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%	
<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>						
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.711.440.989	26,83	2.433.201.664	89,74	98,43
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.135.550.000	11,23	1.038.923.580	91,49	100,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	139.500.000	1,38	139.500.000	100,00	100,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	0,10	9.000.000	90,00	100,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	368.115.000	3,64	356.229.500	96,77	100,00
<b>PROGRAM UTAMA</b>						
6.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.743.194.000	56,82	5.185.811.410	90,29	106,25
<b>JUMLAH 2019</b>		<b>10.107.799.989</b>	<b>100</b>	<b>9.162.666.154</b>	<b>90,65</b>	<b>100,78</b>

Realisasi Program dan Kegiatan  
Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Program/Kegiatan	Perkembangan Pelaksanaan			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan %	Fisik %
<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>					
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.711.440.989</b>	<b>2.433.201.664</b>	<b>89,74</b>	<b>98,43</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.100.000	9.435.200	85,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.100.000	234.807.272	86,29	100,00
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	450.218.000	425.320.000	94,47	100,00
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.525.088	40.542.000	95,43	100,00
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	212.965.901	198.852.000	93,37	100,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.861.000	69.554.500	81,96	82,72
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	34.249.900	97,86	100,00
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	29.700.000	66,00	100,00
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	41.325.000	26.855.000	64,98	100,00
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.421.046.000	1.296.600.992	91,24	100,00
	- Penyediaan Iklan Layanan	95.300.000	67.284.800	70,60	100,00
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.135.550.000</b>	<b>1.038.923.580</b>	<b>91,49</b>	<b>100,00</b>
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	388.500.000	386.783.100	99,56	100,00
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	373.300.000	325.982.480	87,32	100,00
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	348.875.000	301.293.000	86,36	100,00
	- Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor	24.875.000	24.865.000	99,96	100,00
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>139.500.000</b>	<b>139.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	139.500.000	139.500.000	100,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	10.000.000	9.000.000	90,00	100,00



No	Program/Kegiatan	Perkembangan Pelaksanaan			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan %	Fisik %
5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>368.115.000</b>	<b>356.229.500</b>	<b>96,77</b>	<b>100,00</b>
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.250.000	36.250.000	100,00	100,00
	- Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	71.400.000	65.252.500	91,39	100,00
	- Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas/Badan	32.450.000	32.450.000	100,00	100,00
	- Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	137.730.000	137.380.000	99,75	100,00
	- Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	18.575.000	18.550.000	99,87	100,00
	- Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2	71.710.000	66.347.000	92,52	100,00
<b>PROGRAM UTAMA</b>					
6.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>5.743.194.000</b>	<b>5.185.811.410</b>	<b>90,29</b>	<b>106,25</b>
	- Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2	85.350.000	71.375.000	83,63	117,36
	- Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	210.550.000	129.715.000	61,61	142,57
	- Evaluasi Penerimaan PBB-P2	663.960.000	543.895.000	81,92	80,54
	- Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	127.215.000	122.261.500	96,11	100,00
	- Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	86.420.000	74.075.000	85,72	100,00
	- Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2	181.450.000	123.192.250	67,89	117,36
	- Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2	232.075.000	229.412.500	98,85	100,00
	- Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	90.290.000	71.375.000	79,05	100,00
	- Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	2.003.125.000	1.881.157.856	93,91	100,00
	- Penyuluhan Pajak Daerah	174.460.000	168.663.000	96,68	100,00
	- Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	64.950.000	59.697.500	91,91	100,00
	- Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	66.450.000	57.476.250	86,50	100,00
	- Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	262.878.000	255.253.000	97,10	100,00

No	Program/Kegiatan	Perkembangan Pelaksanaan			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan %	Fisik %
	- Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60.150.000	59.375.000	98,71	143,31
	- Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	146.600.000	146.600.000	100,00	100,00
	- Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah	63.526.000	63.526.000	100,00	100,00
	- Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	101.620.000	101.620.000	100,00	100,00
	- Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2	90.800.000	46.848.000	51,59	45,45
	- Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	72.275.000	72.225.000	99,93	100,00
	- Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	335.900.000	334.610.000	99,62	144,71
	- Penyempian dan Penagihan PBB-P2	534.425.000	487.133.554	91,15	109,04
	- Penilaian dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah	48.725.000	46.325.000	95,07	143,31
	<b>JUMLAH 2019</b>	<b>10.107.799.989</b>	<b>9.162.666.154</b>	<b>90,65</b>	<b>100,78</b>

Dari tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 5 Program Pendukung dan 1 Program Utama. 4 Program Pendukung dengan penyerapan anggaran dibawah 100% sebagai efisiensi anggaran sedangkan realisasi fisik mencapai 100% dan 1 Program yang capaian fisiknya 98,43% yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disebabkan pada kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada kegiatan penggandaan (Fotocopy) dari volume 139.444 lembar terealisasi 115.348 Lembar (82,72%) sudah terlaksana sesuai kebutuhan kantor dalam tahun 2019, sedangkan untuk Program Utama yaitu Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penyerapan anggaran 90,65% dan capaian kinerja (Fisik) 106,25%.

Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan Indikator dan Target Kinerja Kepala Bidang yang dijadikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PK) Eselon III antara lain:

## 1. Bidang Pajak Daerah

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
I.	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	▪Meningkatnya penerimaan 9 pajak daerah	Persentase peningkatan penerimaan 9 pajak daerah	12,12%	9,79%	80,78%	Kabid Pajak Daerah
	▪ Pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah	▪Tersedianya data wajib pajak daerah yang up to date	Jumlah pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.	10.300 SPTPD/S KPD	14.761 SPTPD/ SKPD	143,31%	Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan
	▪ Pengelolaan data sistem informasi 9 pajak daerah dan retribusi daerah	▪Tersedianya sistem informasi 9 pajak daerah	Jumlah sistem informasi 9 pajak daerah yang dikelola.	1 Sistem	1 Sistem	100%	
	▪ Penilaian dan penetapan pajak/ retribusi daerah	▪Tersampainya nya SPTPD/SKPD yang diterbitkan kepada wajib pajak daerah ▪Tercapainya penerimaan 9 pajak daerah	▪ Jumlah SPTPD/SKPD yang diterbitkan dan disampaikan ▪ Persentase realisasi penerimaan 9 pajak daerah	10.300 SPTPD/ SKPD  100%	14.761 SPTPD/ SKPD  115,33%	143,31%  115,33%	Kasubbid Perhitungan dan Penetapan
	▪ Penagihan pajak dan retribusi daerah	▪Tercapainya penerimaan 9 pajak daerah	Jumlah SPTPD/ SKPD yang tertagih	10.300 SSPD	14.905 SSPD	144,71%	Kasubbid Penagihan Verifikasi dan Keberatan
	▪ Koordinasi peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	▪Tercapainya penerimaan PAD	Jumlah koordinasi peningkatan PAD	16 Kali	16 Kali	100%	

## 2. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Bidang PBB –P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (UTAMA)</b>	<b>Meningkatnya Penerimaan PBB P2 dan BPHTB</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerimaan PBB P2 dan BPHTB</b>	<b>0,74%</b>	<b>20,98%</b>	<b>2.835,14%</b>	<b>Kabid PBB P2 dan BPHTB</b>
	▪ Pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek PBB P2	Tersedianya data wajib pajak PBB P2 yang akurat	Jumlah data wajib pajak PBB P2	7.000 OP	8.215 OP	117,36%	Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan
	▪ Pengelolaan dan sistem informasi PBB P2	Tersedianya sistem informasi PBB P2	Jumlah sistem informasi PBB P2 yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	100%	
	▪ Verifikasi dan validasi data objek dan subjek PBB P2	Tersedianya data PBB P2	Jumlah data objek dan subjek PBB P2 yang diverifikasi	7.000 OP PBB P2	8.215 OP	117,36%	
▪ Rapat koordinasi intensifikasi PBB P2	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman aparat kecamatan, kelurahan dan desa terhadap pengelolaan PBB P2	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi intensifikasi PBB P2	1 Kali	1 Kali	100%	Kasubbid Perhitungan dan Penetapan	
▪ Evaluasi penerimaan PBB P2	Tercapainya penerimaan PBB P2	Realisasi penerimaan PBB P2	5 M	Rp. 4.832.443.637	96,65%		
	▪ Penyampaian dan penagihan PBB P2	Tercapainya penerimaan PBB P2	Jumlah penyampaian SPPT dan penagihan PBB P2	110.000 SPPT 700 BPHTB	104.429 SPPT 862 BPHTB	94,94% 123,14%	Kasubbid Penagihan, Verifikasi dan Keberatan
	▪ Pelayanan mobil keliling PBB P2	Meningkatnya pelayanan kepada WP (masyarakat)	Jumlah pelayanan mobil keliling PBB P2	88 Kali	40 Kali	45,45%	
	▪ Verifikasi dan validasi pelayanan BPHTB	Tersedianya data BPHTB	Jumlah data objek BPHTB yang diverifikasi	700 OP	998 OP	142,57%	
	2.	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pendukung)</b>					
	▪ Rekonsiliasi penerimaan dan piutang PBB P2	Tersedianya laporan yang akurat	Rekonsiliasi penerimaan dan piutang PBB P2	1 Kali (13 Kcc)	1 Kali	100%	

Untuk kegiatan yang capaiannya dibawah 100% antara lain :

- Evaluasi Penerimaan PBB P2 dengan capaian 96,65% tidak tercapainya target karena target terlalu besar dari pokok ketetapan PBB P2
- Penyampaian dan penagihan PBB P2 dengan capaian 94,94% disebabkan SPPT ada yang dikembalikan/ dibatalkan akibat ganda dan OP/WP tidak ditemukan

- Pelayanan mobil keliling PBB P2 dengan capaian 45,45% disebabkan dari target 88 kali terealisasi 40 kali karena pembayaran PBB P2 di Kecamatan/ Kelurahan banyak yang melakukan penyetoran secara kolektif melalui Bank atau ke Badan Pendapatan Daerah.

### 3. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Bidang pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (UTAMA)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan, administrasi dan pembukuan pendapatan daerah	Persentase laporan pendapatan daerah tepat waktu dan benar	100%	100%	100%	Kabid Pengendalian dan Pelaporan
	▪ Koordinasi penerimaan pendapatan daerah	▪ Tercapainya target penerimaan daerah  ▪ Tersedianya laporan evaluasi penerimaan dana transfer	▪ Jumlah koordinasi penerimaan dana transfer ke pemerintah pusat  ▪ Jumlah laporan evaluasi penerimaan dana transfer per triwulan	12 Kali  4 Lap	12 Kali  4 Lap	100%  100%	Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Dana Transfer
	▪ Pelayanan dan pengadministrasian benda berharga	Terlaksananya pelayanan dan administrasi benda berharga dengan efektif, efisien dan tepat waktu	Jumlah jenis pelayanan benda berharga	40 Jenis	40 Jenis	100%	Kasubbid Pengelolaan Benda Berharga
	▪ Pelaporan penerimaan pendapatan daerah	Tertibnya administrasi pelaporan pendapatan daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pendapatan daerah	12 Lap	12 Lap	100%	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
	▪ Penyusunan target penerimaan pendapatan daerah	Tersedianya laporan target penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan rencana penerimaan dan pendapatan daerah	2 Lap	2 Lap	100%	
2.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pendukung)						
	▪ Rekoniliasi penerimaan SKPD pengalokasian pendapatan daerah	Tersedianya data penerimaan daerah yang akurat dan akuntabel	Jumlah laporan hasil rekoniliasi penerimaan daerah	12 Lap	12 Lap	100%	
	▪ Pengalokasian data penerimaan pendapatan daerah	Tersedianya data penerimaan daerah yang akurat dan akuntabel	Jumlah data laporan penerimaan pendapatan daerah	12 Buku Lap	12 Buku Lap	100%	

#### 4. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya potensi sumber pendapatan daerah	▪ Persentase layanan informasi pajak daerah yang mutakhir dan akurat	100%	100%	100%	Kabid Pengembangan Pendapatan Daerah
			▪ Persentase potensi sumber pendapatan daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	
	▪ Pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	▪ Tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah ▪ Meningkatnya pengendalian pajak daerah melalui pemeriksaan pajak daerah	▪ Jumlah sistem informasi pajak daerah ▪ Jumlah data objek pajak yang diperiksa	6 Aplikasi 100 OP	6 Aplikasi 100 OP	100% 100%	Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah
	▪ Peningkatan kualitas SDM pengelola pajak daerah	Meningkatnya kemampuan pengelola pajak daerah	Jumlah aparatur yang diberi pelatihan pengelola pajak daerah	20 Orang	20 Orang	100%	
	▪ Penyusunan produk hukum di bidang pajak daerah	Tersedianya produk hukum pajak daerah	Jumlah produk hukum pajak daerah yang diterbitkan	1 Produk hukum	1 Produk hukum	100%	Kasubbid Pengkajian Potensi Pendapatan
	▪ Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Tersedianya data potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	1 Kali	1 Kali	100%	
	▪ Penyuluhan pajak daerah	Meningkatnya pemahaman WP melalui penyuluhan pajak daerah	Jumlah WP mengikuti penyuluhan	750 WP	750 WP	100%	Kasubbid Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah
	▪ Kajian dan promosi peningkatan pendapatan daerah	Terlaksananya apresiasi terhadap wajib pajak dan masyarakat	Persentase pelaksanaan kajian pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah	100%	100%	100%	



## 5. Sekretariat

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningakntnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%	Sekretaris
	▪ Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	Kasubbag Umum/Kepegawaian
	▪ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan komunikasi, sumber air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Keuangan
	▪ Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	Kasubbag Umum/Kepegawaian
	▪ Penyediaan ATK	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	98,43%	
	▪ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	
	▪ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penyediaan makanan dan	Terpenuhinya pelayanan	Penyediaan makan minum	12 Bulan	12 Bulan	100%	

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	minuman	administrasi perkantoran	rapat				
	▪ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Pelaksanaan rapat koordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kab lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penyediaan iklan layanan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Layanan iklan masyarakat	100%	100%	100%	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan komponen IKM	100%	100%	100%	Sekretaris
	▪ Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Gedung kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	Kasubbag Umum/Kepegawaian
	▪ Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	43 Unit	43 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penataan administrasi barang inventaris kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah laporan barang inventaris kantor	1 Lap	1 Lap	100%	
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						<b>Sekretaris</b>
	▪ Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Jumlah pembuatan pakaian dinas seragam untuk PNS, TKK/TKS	261 Stel	261 Stel	100%	Kasubbag Umum/Kepegawaian
4	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Fomal</b>						<b>Sekretaris</b>
	▪ Pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya kualitas sumber	Jumlah aparatur yang mengikuti	3 Orang	3 Orang	100%	Kasubbag Umum/

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	formal dan non formal	daya aparatur	pelatihan				Kepegawaian
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	100%	Sekretaris
	▪ Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian evaluasi kinerja dan laporan kinerja OPD	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan (evaluasi renja, evaluasi renstra serta LPPD dan LKJ)	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan Evaluasi Pelaporan Program
	▪ Penyusunan perencanaan program kerja dinas/buadan	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD	▪ Jumlah dokumen renja (renwal, renstragap, rancangan skbr, anggaran pendanaan dan anggaran skbr perubahan) ▪ Jumlah dokumen RKA (RKA dan RKA perubahan)	5 Dokumen  2 Dokumen	5 Dokumen  2 Dokumen	100%  100%	
	▪ Penatausahaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Tersusunnya laporan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Jumlah laporan penerimaan perangkat daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	Kasubbag Keuangan

Dari 6 program yang dilaksanakan, 4 Program Pendukung dengan capaian fisik masing-masing 100% dan 1 program yang capaian fisiknya dibawah 100%, sedangkan untuk Program Utama yaitu Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian fisik 106,25%. Ini disebabkan ada beberapa kegiatan dengan capaian fisiknya mencapai lebih dari 100% antara lain :

1. Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB P2 dari target sebesar 7.000 OP PBB-P2 Realisasi sebesar 8.215 OP PBB-P2
2. Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB dari target sebesar 700 OP Realiasi sebesar 998 OP
3. Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2 dari target sebesar 7.000 OP Realisasi sebesar 8.215 OP
4. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari target 10.300 SPTPD Realisasi sebesar 14.761 SPTPD



5. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dari target sebesar 10.300 SSPD Realisasi sebesar 14.905 SSPD
6. Penyampaian dan Penagihan PBB-P2
  - Target sebesar 110.000 SPPT Realisasi PBB P2 sebesar 104.429 SPPT dikarenakan SPPT ada yang di kembalikan/dibatalkan akibat ganda dan OP/WP tidak ditemukan.
  - Target 700 BPHTB Realisasi BPHTB sebesar 862 BPHTB.
7. Penilaian dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah Realisasi sebesar 14.761 SPTPD/SKPD dari target sebesar 10.300 SPTPD/SKPD

Sedangkan kegiatan yang capaian kinerja (fisik) dibawah 100% antara lain:

1. Evaluasi Penerimaan PBB-P2 dengan Indikator terlaksananya Penerimaan PBB-P2 dengan target 6 M terealisasi Rp. 4.832.134.496 dengan capaian 80,54% tidak tercapai target karena target terlalu besar dari pokok ketetapan PBB-P2.
2. Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2 dengan Indikator terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2 dengan target 88 kali di 11 Kecamatan hanya dilaksanakan 40 kali untuk efisiensi Anggaran karena secara umum Desa/Kelurahan banyak yang melakukan penyetoran secara kolektif melalui Bank atau ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang capaian realisasi keuangan maupun fisik dibawah 80% antara lain :

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi keuangan sebesar 66,00% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan (Efisiensi Anggaran), untuk realisasi fisik 100%.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi keuangan sebesar 64,98% karena sebagian dari belanja makan minum diperuntukkan untuk tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah dan tamu yang datang selama tahun 2019 sehingga dana tersebut tidak terserap seluruhnya, untuk realisasi fisik 100%.

3. Penyediaan iklan layanan dengan realisasi keuangan sebesar 70,60% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi anggaran) untuk realisasi fisik telah mencapai 100%.
4. Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB dengan realisasi keuangan 61,61% karena efisiensi perjalanan dinas dan waktu, untuk realisasi fisik 142,57%.
5. Pendataan dan Pemuktahiran data objek dan subjek PBB-P2 realisasi keuangan sebesar 67,89% karena saat proses pendataan objek pajak telah dilaksanakan oleh Tim UI sehingga waktu turun ke lapangan terbatas, untuk realisasi fisik 117,36%.
6. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 79,05% karena pelaksanaan kegiatan rencana pendapatan APBD TA. 2020 dan APBDP TA. 2019 dilakukan secara bersamaan (efisiensi anggaran), untuk realisasi fisik 100%.
7. Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2 dengan realisasi keuangan sebesar 51,59% dan realisasi fisik sebesar 45,45% karena secara umum Desa/ Kelurahan banyak yang melakukan penyetoran secara kolektif melalui Bank atau ke Badan Pendapatan Daerah.

Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 80% sedangkan fisiknya mencapai 100% merupakan efisiensi Anggaran namun untuk kegiatan Pelayanan Mobil Keliling yang capaian fisik dan keuangannya dibawah 100% untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun yang akan datang akan kami Evaluasi kembali dan akan kami sesuaikan anggaran dan kebutuhan Pelayanan Mobil Keliling untuk penagihan PBB-P2 ke Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan untuk kegiatan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 dengan capaian realisasi Penerimaan PBB-P2 dari target 6 M terealisasi 80,54% (Rp.4.832.134.496) upaya yang akan kami lakukan terus melakukan Pendataan dan Pemuktahiran Data WP PBB-P2 untuk ditetapkan menjadi pokok ketetapan PBB-P2.

Program prioritas (Utama) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana terdapat pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 yakni Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target dan realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Program Prioritas Pelaksanaan	Indikator Kinerja (outcome)	Kualifikasi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	6%	(81.148.347,972)	4.293.000.000	26,27% (85.891.667.798,74)	1.838.643.698	0,21% (83.231.255.191)	8.117.848.000	22,46% (105.183.810.732,39)	7.508.399.874	2% (85.000.000.000)	11.945.480.550	2,57% (107.888.139.228,52)	7.899.004.282	5,1% (89.335.000.000)	5.743.194.000	12,78% (121.680.052.811,03)	5.185.811.410

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jabarkan bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2016 dari target 6% terealisasi sebesar 26,27% (jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 85.891.667.778,74) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 3.838.643.698,-, Tahun 2017 dari target 0,21% terealisasi 22,46% (jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 105.183.811.202,39) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 7.508.399.874,-, Tahun 2018 dari target 2% terealisasi sebesar 2,57% (jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 107.888.139.228,52) diluar penerimaan Dana BOS SD/SMP Rp. 40.052.280.000 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 7.899.004.282,- dan Tahun 2019 dari target 5,1% terealisasi sebesar 12,78% (jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 121.680.052.811,03) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 5.185.811.410.



## A. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Belanja yang dianggarkan pada APBDP Perubahan Bapenda Tahun 2019 Sebesar Rp. 16.116.507.869 terealisasi Sebesar Rp. 14.908.830.528 atau 92,51% yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	15.310.807.869	14.133.753.722	92,31
2.	Belanja Modal	805.700.000	775.076.806	96,20
<b>Jumlah</b>		<b>16.116.507.869</b>	<b>14.908.830.528</b>	<b>92,51</b>

Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai dengan Anggaran Rp.6.008.707.880 terealisasi Rp.5.746.164.374 atau 95,63% dan Belanja Barang Jasa dengan Anggaran Rp.9.302.099.989 terealisasi Rp.8.387.589.348 atau 90,17%.

Sedangkan Belanja Modal dari Anggaran Rp.805.700.000 terealisasi Rp.775.076.806 atau 96,20%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang terdiri dari 2 Sasaran Kinerja antara lain:

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah dengan target 5,1% terealisasi 12,78% dengan capaian kinerja 250,59%.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Nilai Sebesar 76,61 terealisasi 77,70 dengan capaian 101,42%.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Pajak Daerah pada Tahun 2019 dari target Rp.32.642.525.620 terealisasi sebesar Rp.35.522.616.431,50 atau 108,82% terjadi peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 13,27% ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah meningkat, terjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat, bertambahnya upaya pengelolaan aset milik daerah yang dimanfaatkan masyarakat, semakin baik pengelolaan keuangan dan belanja daerah.

Meskipun peningkatan penerimaan PAD dan Pajak Daerah sudah melampaui target yang ditetapkan, Bapenda terus melakukan inovasi untuk kemudahan dalam pembayaran Pajak Daerah dengan terlaksananya Pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah dengan memakai 6 Aplikasi antara lain Sismiop, BPHTB, Simpada, Simpareda, E-payment dan Web Bapenda.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah :

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009;

2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tidak dilakukan dengan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD untuk kedepannya melalui Optimalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi pungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah, yaitu dengan cara :

- Melakukan Pendataan Subjek dan Objek Pajak Daerah
- Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait
- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui Kegiatan Sosialisasi

3) Terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

#### **b. Dana Perimbangan**

Penetapan pagu dana perimbangan ditetapkan berdasarkan alokasi definitif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar ada peningkatan setiap tahunnya, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPB).

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan Dana Transfer (Dana Perimbangan) yang diterima oleh Daerah maka langkah kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan antara lain :



- Mengintensifkan/ Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Tekhnis (Kementerian ESDM, Kehutanan dan Perikanan) dan Pemerintah Provinsi terkait dengan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Maupun Bukan Pajak termasuk yang diperoleh melalui Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam maupun Penerimaan Lainnya.
- Meningkatkan Pengawasan terhadap para Stake Holder/ Investor selaku Penyumbang Pendapatan yang berada di Wilayah Daerah Penghasil
- Memanfaatkan seluruh Teknologi dan Informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah sehingga perolehan data dan informasi yang akurat
- Melakukan evaluasi terhadap Penetapan Penerimaan Dana Transfer termasuk Penetapan Produksi dari Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Pertambangan Umum.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- 1) Pendapatan dari Bagi hasil Pajak Provinsi sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan dana transfer bagi hasil pajak.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disamping berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban penyelenggaraan negara kepada masyarakat.

Kuala Tungkal, 27 Maret 2020

KEPALA BAPENDA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA  
 NOMOR : 970/ 40 /BAPENDA/2019  
 TANGGAL : 16 Mei 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 TAHUN 2016 – 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Optimalisasi penerimaan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	$\text{Tingkat Kenaikan Penerimaan PAD} = \frac{(\text{Tahun sekarang} - \text{Tahun Lalu})}{\text{Tahun lalu}} \times 100$	6%	0,21%	2,0%	5,1%	5,3%	5,7%	RPJM	KEPALA BAPENDA
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	-	-	-	76,61	77	78	Hasil survey	KEPALA BAPENDA



**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2019**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2019	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	5	6
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Aparatur Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Akuntabilitas</b>		<b>2.621.440.989</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	11.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	272.100.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	450.218.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	42.525.088
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	212.965.901
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	64.861.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	35.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	45.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat, Jamuan Tamu, Petugas Piket Pelayanan	12 Bulan	41.325.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	1.331.046.000
Penyediaan Iklan Layanan	Terlaksananya Iklan Layanan	100%	95.300.000
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Aparatur Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Akuntabilitas</b>		<b>871.725.000</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	112.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	43 Unit	374.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	360.250.000
Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor	Tersedianya Data Administrasi Barang Inventaris Kantor	12 Bulan	24.875.000
<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Aparatur Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Akuntabilitas</b>		<b>139.500.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan seragam untuk PNS, TKS/TKK yang disediakan	261 Setel	139.500.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Aparatur Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Akuntabilitas</b>		<b>10.000.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	100%	10.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Aparatur Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Akuntabilitas</b>		<b>368.115.000</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan yang disusun	12 Laporan	36.250.000
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	Terlaksananya rapat rekonsiliasi penerimaan daerah dengan SKPD	12 Bulan	71.400.000
Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2	Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan piutang PBB P2	13 Kec	71.710.000
Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok Renja 2 Dok RKA	32.450.000
Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya data penerimaan pendapatan daerah yang akurat dan akurat	12 Buku Lap	137.730.000
Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya administrasi yang teratur dan tertib	12 Bulan	18.575.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>5.890.019.000</b>
Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah data objek dan subjek PBB-P2 yang diverifikasi	7000 OP	85.350.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2019	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	5	6
Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	Jumlah data objek BPHTB yang diverifikasi	700 OP	210.550.000
Evaluasi Penerimaan PBB P2	Terlaksananya penerimaan PBB P2	6 M	663.960.000
Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB P2	Jumlah rapat koordinasi intensifikasi PBB P2 yang dilaksanakan	1 Kali	127.215.000
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Terlaksananya pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	100%	86.420.000
Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah data wajib pajak PBB P2	7000 OP	181.450.000
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya target penerimaan pendapatan daerah	2 Kali	90.290.000
Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	Terlaksananya kajian pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah	100%	1.955.775.000
Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan produk hukum di bidang pajak daerah	100%	62.950.000
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Jumlah jenis pelayanan dan pengadministrasian benda berharga	40 Jenis	262.878.000
Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah pendaftaran dan pendataan pajak daerah	10300 SPTPD/SKPD	43.475.000
Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2	Terlaksananya pengelolaan data sistem informasi PBB P2	12 Bulan	232.075.000
Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya koordinasi pendapatan daerah	12 Bulan	63.526.000
Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah yang dilaksanakan	16 Kali	101.620.000
Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah pelayanan mobil keliling PBB P2 yang dilaksanakan	11 Kec 88 Kali	90.800.000
Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pelaporan penerimaan pendapatan daerah	12 Bulan	72.275.000
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah penagihan pajak daerah	10300 SSPD	335.900.000
Penyampaian dan Penagihan PBB P2	Jumlah penyampaian SPPT dan penagihan PBB P2 BPHTB	110.000 SSPT 700 BPHTB	548.775.000
Penilaian dan Penetapan Pajak / Retribusi Daerah	Jumlah penyampaian keketetapan pajak daerah	10300 SPTPD/SKPD	48.725.000
Penyuluhan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan pajak daerah	750 WP	174.460.000
Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya data berbasis sistem informasi pengelolaan pajak yang efektif, transparan dan akurat	12 Bulan	146.600.000
Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah	Terlaksananya peningkatan kemampuan pengelola pajak	100%	40.000.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan intensifikasi & ekstensifikasi pajak daerah	2 Kali Rakor	64.950.000
			<b>9.700.799.889</b>



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YON HERI, SP, ME

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir .H. SAFRIAL, MS

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 16 Mei 2019

Pihak Kedua,

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

Pihak Pertama,

**KEPALA BAPENDA,**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	5,1%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61%
		Nilai Akip	62%

**PROGRAM ANGGARAN**

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**KETERANGAN**

Rp. 5.823.915.000

Dana APBD

Kuala Tungkal, 16 Mei 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS



KEPALA BAPENDA,

YON HERI, SP, ME



**PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNGPING BARAT  
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA %	KET
	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	- Tingkat Kematangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	5,1%	12,76%	250,86	Rp 107.886.139.228,52
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai AKJP	76,61 62	77,70 68,13	101,42 109,89	Rp 121.680.052.811,03

Kuala Tunggal, 13 Februari 2020











**KUISIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PADA UNIT LAYANAN BAPENDA KAB. TANJAB BARAT PROVINSI JAMBI**

Tanggal Survei : \_\_\_\_\_ Jam Survei :  08.00 – 12.00\*  
 13.00 – 17.00\*

**PROFIL**

Jenis Kelamin :  L  P Usia : ..... Tahun  
 Pendidikan :  SD  SMP  SMA  S1  S2  S3  
 Pekerjaan :  PNS  TNI  POLRI  SWASTA  WIRUSAHA  
 LAINNYA..... (Sebutkan)  
 Jenis Layanan yang diterima : Pajak Dacrah

**II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN  
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)**

	P*}
1. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kesesuaian pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak Mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	1 2 3 4
3. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. a. Sangat Mahal b. Cukup Mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4
5. Bagaimana Pendapat Saudara tentang hasil kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4

	P*}
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. a. Tidak Sopan dan ramah b. Kurang Sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana. a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4





46	4	4	3	3	3	2	3	3	3
47	3	3	3	3	3	4	4	3	2
48	2	3	3	3	3	3	3	4	4
49	4	3	3	2	3	3	3	3	4
50	3	3	4	3	3	2	3	4	3
51	3	3	3	3	2	4	4	3	3
52	4	4	3	3	3	3	3	3	2
53	4	4	3	3	3	3	3	3	2
54	3	3	3	3	3	3	4	2	4
55	3	3	3	3	3	3	4	4	2
56	3	3	3	3	3	3	4	4	2
57	4	4	3	3	3	3	3	2	3
58	4	4	3	3	3	3	3	4	2
59	3	3	3	3	3	4	3	4	2
60	4	4	3	3	3	3	3	4	2
61	3	3	3	3	3	4	4	3	2
62	4	3	3	3	3	3	3	4	2
63	4	4	2	3	3	3	3	3	3
64	4	4	3	3	3	3	3	3	2
65	4	4	3	3	3	3	3	3	2
66	4	4	3	3	3	3	3	3	2
67	4	4	3	3	3	3	3	2	3
68	3	3	3	3	3	3	4	4	2
69	4	4	3	3	3	3	3	3	2
70	4	4	3	3	3	3	3	2	3
71	4	4	3	3	3	3	3	3	2
72	4	3	3	3	2	3	4	3	3
73	3	3	4	3	3	4	3	3	2
74	4	3	3	3	3	3	2	3	4
75	4	3	3	2	3	4	3	3	3
76	3	3	3	2	3	4	4	3	3
77	4	3	3	3	3	2	4	3	3
78	3	4	3	3	4	3	2	3	3
79	3	3	3	4	3	2	3	3	4
80	2	3	3	3	3	3	4	4	3
81	3	3	4	2	4	3	3	3	3
82	3	4	3	3	2	4	3	3	3
83	4	3	3	2	3	4	3	3	3
84	2	4	3	3	3	3	3	2	4
85	3	3	4	3	4	3	3	3	2
86	4	3	3	2	4	3	3	3	3
87	3	4	2	3	3	3	4	3	3
88	3	3	3	3	3	4	4	3	2
89	4	2	3	3	3	3	3	4	3
90	3	4	3	3	3	4	3	2	3
91	3	3	2	4	3	3	3	4	3
92	4	3	3	3	3	4	2	3	3
93	2	3	3	4	4	3	3	3	3
94	3	3	3	3	3	2	2	4	3
95	4	3	3	3	2	4	3	3	3
96	3	4	3	3	2	3	4	3	3
97	4	3	3	3	3	4	3	3	2
98	4	4	2	3	3	3	3	3	3
99	3	3	3	3	3	4	3	2	4
100	4	2	4	3	3	3	3	3	3
101	2	3	3	4	3	4	3	3	3

102	4	4	2	3	3	3	3	3	3
103	3	3	4	3	4	3	2	3	3
104	3	4	3	3	3	4	3	3	2
105	3	3	4	3	4	2	3	3	3
106	4	2	4	3	3	3	3	3	3
107	4	4	2	3	3	3	3	3	3
108	3	3	3	3	3	4	4	2	3
109	4	4	2	3	3	3	3	3	3
110	3	3	2	3	3	4	4	3	3
111	3	3	3	3	3	4	4	2	3
112	4	4	3	3	3	3	3	3	2
113	3	3	3	3	3	4	2	4	3
114	4	4	2	3	3	3	3	3	3
115	2	3	3	3	3	4	4	3	3
116	4	3	3	3	3	2	3	4	3
117	2	4	3	3	3	3	3	4	3
118	3	3	4	3	3	2	4	3	3
119	2	3	3	4	4	3	3	3	3
120	4	3	4	2	3	3	3	3	3
121	2	4	4	3	3	3	3	3	3
122	2	4	3	3	3	4	3	3	3
123	2	3	3	3	3	4	4	3	3
124	4	3	3	3	3	2	4	3	3
125	3	3	2	3	4	3	3	3	4
126	2	4	3	3	4	3	3	3	3
127	2	3	4	3	3	3	4	3	3
128	2	4	3	3	3	3	4	3	3
129	4	3	3	3	3	2	4	3	3
130	4	2	3	3	3	4	3	3	3
131	4	3	2	3	3	4	3	3	3
132	3	3	3	3	2	3	3	4	4
133	3	3	3	4	2	3	3	3	3
134	4	2	3	3	3	4	3	3	3
135	2	4	3	4	3	3	3	3	3
136	2	4	3	4	3	3	3	3	3
137	3	3	4	2	3	3	3	3	4
138	3	3	3	3	2	3	3	4	4
139	3	3	2	4	3	3	3	3	4
140	2	4	4	3	3	3	3	3	3
141	4	3	4	2	3	3	3	3	3
142	2	3	3	4	3	3	3	3	4
143	3	3	3	3	3	3	2	4	4
144	2	3	4	4	3	3	3	3	3
145	3	3	3	2	4	4	3	3	3
146	4	4	3	2	3	3	3	3	3
147	3	3	3	3	3	2	3	4	4
148	3	3	3	4	3	4	3	3	2
149	3	3	3	2	4	3	4	3	3
150	4	4	3	3	3	3	3	3	2
151	3	3	4	2	4	3	3	3	3
152	4	4	2	3	3	3	3	3	3
153	3	4	3	2	4	3	3	3	3
154	4	3	2	3	4	3	3	3	3
155	3	3	2	4	3	3	3	3	4
156	3	3	4	2	3	3	3	3	4
157	3	3	3	4	3	3	3	4	2

158	2	3	3	4	4	3	3	3	3	
159	4	4	3	2	3	3	3	3	3	
160	3	3	3	2	4	3	3	3	4	
161	2	4	3	4	3	3	3	3	3	
162	3	3	3	2	4	3	3	4	3	
163	2	4	3	3	3	4	3	3	3	
164	4	3	3	3	3	4	3	3	2	
165	3	3	3	3	2	4	4	3	3	
166	4	3	3	3	4	2	3	3	3	
167	3	3	3	4	2	3	3	4	3	
168	4	3	3	2	3	3	4	3	3	
169	3	2	3	4	3	3	4	3	3	
170	2	4	3	3	3	3	3	3	4	
171	3	3	2	3	4	3	3	3	4	
172	4	3	3	3	2	3	3	3	4	
173	2	3	3	3	4	3	3	4	3	
174	3	3	3	3	3	2	4	4	3	
175	3	3	3	3	4	4	3	3	2	
176	4	4	3	2	3	3	3	3	3	
177	2	3	3	3	3	4	3	3	4	
178	3	3	4	2	4	3	3	3	3	
179	2	3	3	3	4	3	3	3	4	
180	3	3	3	2	4	3	4	3	3	
181	3	3	4	3	2	3	3	3	4	
182	3	3	3	3	2	3	3	4	4	
183	2	4	3	3	3	3	4	3	3	
184	4	4	2	3	3	3	3	3	3	
185	2	3	3	3	3	4	3	3	4	
186	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
187	3	3	2	3	3	4	3	4	3	
188	4	3	3	3	3	3	3	2	4	
189	2	3	4	4	3	3	3	3	3	
190	4	4	2	3	3	3	3	3	3	
191	3	3	3	4	2	4	3	3	3	
192	2	4	4	3	3	3	3	3	3	
193	3	3	3	2	3	3	3	4	4	
194	2	3	3	3	4	4	3	3	3	
195	4	4	3	3	3	2	3	3	3	
196	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
197	2	4	4	3	3	3	3	3	3	
198	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
199	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
200	4	3	3	3	3	2	3	4	3	
201										
ΣNilai /Unsur	625	654	606	605	621	631	625	627	603	
NRR / Unsur	3,125	3,270	3,030	3,025	3,105	3,155	3,125	3,135	3,030	
NRR tertbg/	0,347	0,363	0,336	0,336	0,345	0,350	0,347	0,348	0,336	<sup>*)</sup> 3,108
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>U3</b>	<b>U4</b>	<b>U5</b>	<b>U6</b>	<b>U7</b>	<b>U8</b>	<b>U9</b>	
	78,13	81,75	75,75	75,63	77,63	78,88	78,13	78,38	75,75	
<b>IKM pelayanan SKPD/Unit Pelayanan</b>										<sup>**) 77,700</sup>



<b>B.</b>			
No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NRR X 25
U1	Persyaratan pelayanan	3,125	78,13
U2	Prosedur pelayanan	3,270	81,75
U3	Waktu pelayanan	3,030	75,75
U4	Biaya/tarif pelayanan	3,025	75,63
U5	Produk/hasil pelayanan	3,105	77,63
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,155	78,88
U7	Perilaku petugas pelayanan	3,125	78,13
U8	Maklumat pelayanan	3,135	78,38
U9	Mekanisme pengaduan pelayanan	3,030	75,75

**Keterangan :**

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

<b>IKM PELAYANAN SKPD :</b>	<b>77,700</b>
<b>Mutu Pelayanan :</b>	<b>B</b>

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

